

ANALISIS RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BANTAENG)

AINUN JARIAH

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Email: ainunjariahs33@gmail.com

ABSTRACT

This research aimed to study the analysis of the tourism sector retribution on locally-generated revenue. The variables in this research were the tourism sector retribution as an independent variable (X) and locally-generated revenue as a dependent variable (Y). The population was the Bantaeng district regional revenue report and Bantaeng District Tourism Office financial report. The sample was the Bantaeng district regional revenue report and Bantaeng District Tourism Office financial report for 2015-2018. The data were collected through documentation, interview, and observation. The data analyzed using contribution analysis, effectiveness analysis, efficiency analysis, and potential analysis.

the result showed in the year 2015-2018 the contribution of the tourism sector to local revenue of 1,99%, 2,45%, 3,81%, and 3,96% experienced a significant increase every year, but it was in the criteria was very less. The level of the effectiveness of the tourism sector retribution in 2015-2018 by 27,72%, 34,01%, 26,05%, and 31,98% wherein the ineffective criteria. The level of efficiency of the tourism sector retribution in 2015-2018 by 30%, 26%, 34%, and 21%. In 2015, 2016 and 2018, the criteria were quite efficient. Only in 2017 are the criteria inefficient. The potential of each tourist attraction was different. The potential of Marina Beach in 2015-2018 was in the prime criteria. The potential for Permandian Eremerasa in 2015-2018 was in the criteria of development, underdeveloped, prime, prime. Potential of Datuk Pakkalimbungan in 2015-2018 was in the criteria of underdeveloped, underdeveloped, development, development. The potential of Bissappu Waterfalls in 2015-2018 was in the criteria of underdeveloped, underdeveloped, development, development.

Keywords: Locally-Generated Revenue, Tourism Sector Retribution Analysis

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan upaya dalam mengatasi ketimpangan pembangunan antar daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia, dibuatlah konsep otonomi daerah dimana setiap daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

sebagaimana yang tertuang dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah seperti yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai hak: 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 2) memilih pimpinan daerah; 3) mengelola aparatur daerah; 4) mengelola kekayaan daerah; 5) memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; 7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut maka sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Salah satu sumber dana dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, yaitu dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD bersumber dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Salah satu sumber PAD yang ditekankan oleh pemerintah dalam pemungutannya ialah retribusi daerah.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga (3) yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah saat ini berupaya melakukan pengoptimalan terhadap retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha yang paling ditekankan ialah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Berdasarkan Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kemudian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipersempit menjadi Retribusi Sektor Pariwisata.

Kabupaten Bantaeng merupakan kabupaten yang berada di Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng terletak di daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer yang cukup potensial untuk perkembangan perikanan dan rumput laut. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, menetapkan objek wisata antara lain: Permandian Eremerasa, Pantai Marina Korong Batu, Air Terjun Bissappu, dan Datuk Pakkalimbungan.

Kabupaten Bantaeng dengan kekayaan alam yang melimpah, objek wisata dan rekreasi serta peninggalan sejarah yang dimiliki akan mempunyai prospek yang cerah untuk dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata sangat potensial memberikan kontribusi atau devisa terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis retribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (studi kasus di Kabupaten Bantaeng).

KAJIAN TEORI

1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa:

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2. Retribusi Sektor Pariwisata

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa:

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Retribusi Sektor Pariwisata yaitu pungutan yang dibebankan kepada masyarakat atas jasa atau pemberian izin tertentu untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 21 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, menetapkan objek wisata yang

dikenakan tarif retribusi adalah sebagai berikut: Permandian Eremerasa, Air Terjun Bissappu, Pantai Marina Korong Batu, dan Datuk Pakkalimbungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perhitungan retribusi dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$\text{Tingkat Penggunaan Jasa} \times \text{Tarif Retribusi}$
--

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana penelitian ini menggambarkan data yang diperoleh dan menganalisis data yang ada. Yang menjadi objek dari penelitian ini ialah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Populasi penelitian ini adalah laporan Pendapatan Asli Daerah dan laporan keuangan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Adapun sampel penelitian ini adalah laporan

Pendapatan Asli Daerah tahun 2015-2018 dan laporan keuangan Dinas Pariwisata tahun 2015-2018. Untuk memperoleh data digunakan teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis mengenai kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng tahun 2015-2018, mengalami peningkatan yang signifikan, namun berada pada kriteria sangat kurang. Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD tahun 2015 sebesar 1.99%, tahun 2016 sebesar 2.45%, tahun 2017 sebesar 3.81%, dan tahun 2018 sebesar 3.96%.

Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD setiap tahunnya mengalami peningkatan, meskipun berada pada kriteria sangat kurang. Artinya sumbangsi retribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan teori mahmudi (2016:143) yang mengemukakan bahwa apabila kontribusinya tinggi maka akan semakin baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Analisis Efektivitas Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Tingkat efektivitas Retribusi Sektor Pariwisata tahun 2015 sebesar 27.72%, tahun 2016 sebesar 34.01%, tahun 2017 sebesar 26.05%, dan tahun 2018 sebesar 31.98% berada pada kriteria tidak efektif. Tingkat efektivitas realisasi penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng selama 4 tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan berada pada kriteria tidak efektif

Tingkat efektivitas dari tahun 2015 sampai 2018 berada pada kriteria tidak efektif dengan *trend* persentase mengalami fluktuasi disebabkan tingginya target yang ditetapkan setiap tahun sedangkan penerimaan yang diperoleh rendah. Tidak efektifnya realisasi penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu: (1) tingginya target yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng, dan (2) banyaknya wisata baru di Kabupaten Bantaeng yang memberikan pemandangan kekinian namun dengan nuansa alam yang dikelola oleh swasta atau orang pribadi yaitu, Kolang Renang Karaeng Pawiloi, Wisata Bunga Mini Showfarm, Pantai Seruni, Desa Wisata Bukit Daulu, Ertob, Erbol, Air Terjun Simoko, Air Terjun Cina Montea, serta Air Terjun Bantimurung.

3. Analisis Efisiensi Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Tingkat efisiensi Retribusi Sektor Pariwisata tahun 2015 sebesar 30% berada pada kriteria cukup efisien, tahun 2016 sebesar 26% berada pada kriteria cukup efisien, tahun 2017 sebesar 34% berada pada kriteria kurang efisien, dan tahun 2018 sebesar 21% berada pada kriteria cukup efisien. Tingkat efisiensi realisasi penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng selama 4 tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan berada pada kriteria cukup efisien dan kurang efisien.

Biaya pemerolehan Retribusi Sektor Pariwisata terhadap realisasi penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata mempunyai perbandingan dengan nilai yang cukup besar. Hal tersebut menyebabkan tingkat efisiensi Retribusi Sektor Pariwisata mempunyai persentase yang cukup rendah sehingga berada pada kriteria cukup efisien. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Mahmudi (2016:141), bahwa semakin rendah persentase efisiensi maka semakin baik pula kriterianya.

4. Analisis Potensi Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng

Adapun potensi Retribusi Sektor pariwisata dari tiap objek wisata berbeda-beda. Potensi Pantai Marina dari tahun 2015 sampai 2018 berada pada kriteria prima. Potensi Permandian Eremerasa tahun 2015 berada pada kriteria perkembangan, tahun 2016 berada pada kriteria terbelakang, tahun 2017 berada pada kriteria prima, dan tahun 2018 berada pada kriteria prima. Potensi Datuk Pakkalimbungan tahun 2015 berada pada kriteria terbelakang, tahun 2016 berada pada kriteria terbelakang, tahun 2017 berada kriteria perkembangan, dan tahun 2018 berada pada kriteria perkembangan. Potensi Air Terjun Bissappu tahun 2015 berada pada kriteria terbelakang, tahun 2016 berada pada kriteria terbelakang, tahun 2017 berada pada kriteria perkembangan, dan tahun 2018 berada pada kriteria perkembangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontribusi Retribusi Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015-2018 secara berturut-turut sebesar 1.99%, 2.45%, 3.81%, dan 3.96% yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun berada pada kriteria sangat kurang.

2. Tingkat efektivitas Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015-2018 secara berturut-turut sebesar 27.72%, 34.01%, 26.05%, dan 31.98% yang berada pada kriteria tidak efektif. Tidak efektifnya penerimaan Retribusi Sektor Pariwisata disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu: (1) tingginya target yang diberikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng, dan (2) banyaknya wisata baru di Kabupaten Bantaeng yang memberikan pemandangan kekinian namun dengan nuansa alam yang dikelola oleh swasta atau orang pribadi.
3. Tingkat efisiensi Retribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Bantaeng pada tahun 2015-2018 secara berturut-turut sebesar 30%, 26%, 34%, dan 21%. Efisiensi tahun 2015, 2016, dan 2018 berada pada kategori cukup efisien, sedangkan pada tahun 2017 berada pada kategori kurang efisien. Hal ini disebabkan masih tingginya biaya pemungutan yang dikeluarkan tidak diimbangi dengan penerimaan yang lebih besar pula.
4. Potensi dari setiap objek wisata Kabupaten Bantaeng berbeda-beda. Potensi Pantai Marina dari tahun 2015-2018 berada pada kriteria prima. Potensi permandian eremerasa dari tahun 2015-2018 berada pada kriteria perkembangan, terbelakang, prima, prima. Potensi datuk pakkalimbungan dari tahun 2015-2018 berada pada kriteria terbelakang, terbelakang, perkembangan, perkembangan. Potensi air terjun bissappu dari tahun 2015-2018 berada pada kriteria terbelakang, terbelakang, perkembangan, perkembangan.

Berdasarkan hasil dan simpulan penelitian, berikut saran yang dapat diajukan, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bantaeng agar lebih realistis dalam menentukan dan/atau menetapkan target PAD, dimana harus melihat dari penerimaan yang diperoleh serta memberikan upaya yang optimal dalam pengembangan objek wisata, melakukan inovasi sesuai perkembangan zaman.
2. Bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepariwisataan khususnya promosi wisata dengan cara memperkenalkan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Bantaeng melalui media sosial.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya berfokus pada Retribusi Sektor Pariwisata namun untuk semua jenis Retribusi Daerah dan mengetahui lebih mendalam jenis-jenis retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata Kabupaten Bantaeng. (2019). Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Statistik Kepariwisata (Pendataan).
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Ketiga. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

